

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NO. 809/PID.SUS/2024/PN DPS)**

By

Komang Evi Triana, NIM 2214101038

Law Study Program

ABSTRAK

Tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati. Satwa yang dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sehingga keberadaannya harus dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pemeliharaan secara ilegal oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk adanya

perbuatan memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, satwa dilindungi, tindak pidana, putusan pengadilan.



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO. 809/PID.SUS/2024/PN DPS)**

By

Komang Evi Triana, NIM 2214101038

Law Study Program

ABSTRACT

The criminal offense of keeping protected animals is a violation of legal provisions aimed at protecting the sustainability of natural resources. Protected animals play an important role in maintaining the balance of the ecosystem, so their existence must be protected from various forms of exploitation, including illegal keeping by the community. This study aims to identify and analyze the forms of criminal liability for perpetrators of the crime of keeping protected animals, as well as the considerations of judges in handing down verdicts in case No. 809/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research method used in this study is normative legal research with a legislative approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to animal protection, court decisions, and secondary legal materials in the form of books, journals, and other legal literature relevant to this study. The analysis was conducted qualitatively by examining the applicable legal provisions and the judges' considerations in the decision. The results of the study show that criminal liability for perpetrators of crimes involving the keeping of protected animals is based on the provisions of laws and regulations governing the conservation of living natural resources and their ecosystems. In this case, the judge considered the elements of the crime charged to the defendant, including the act of keeping protected animals without permission from the competent authority. In addition, the judge also considered the facts revealed at the trial, the evidence presented, and the aggravating and mitigating circumstances of the defendant before handing down the verdict. Thus, the judge's verdict in this case shows that perpetrators can be

held criminally liable if they are proven legally and convincingly to have kept protected animals without a permit in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Criminal liability, protected animals, criminal acts, court decisions.*

